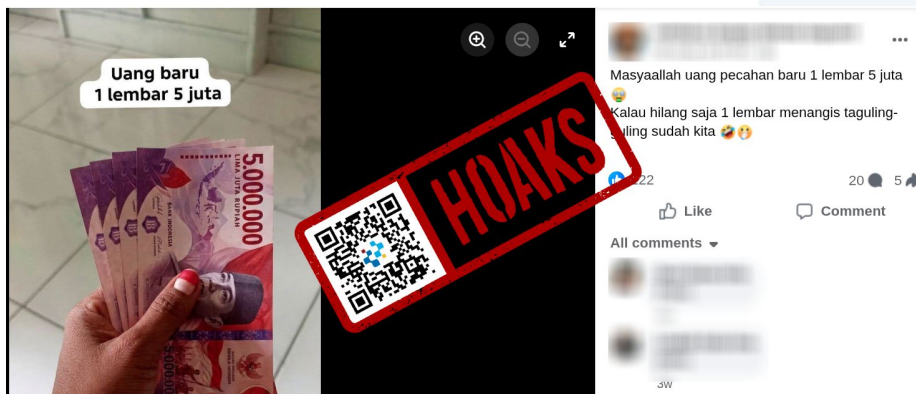


Selasa, 21 Juli 2026

1. [HOAKS] Bank Indonesia Terbitkan Uang Kertas Rp5 Juta Bergambar Soekarno



Penjelasan:

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan Rp5 juta bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, melalui kanal di akun Instagram resminya [@bank_indonesia](https://www.instagram.com/bank_indonesia). Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas Rp5 juta. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Hoaks

Link Counter :

- <https://tirto.id/hoaks-bi-terbitkan-uang-kertas-rp5-juta-bergambar-soekarno-hzWu>
- <https://www.instagram.com/reel/DajpciQuGQE/?igsh=MXB4Mnl2YTB1ZjI5ZQ%3D%3D>

Selasa, 21 Juli 2026

2. [HOAKS] Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Pemilik Sumur Bor Setara PDAM



Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [liputan6.com](https://www.liputan6.com), setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiyadi. Foto Budi Setiyadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial intelligence (AI).

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/8250053/cek-fakta-hoaks-pemerintah-bakal-kenakan-pajak-pemilik-sumur-bor-setara-pdam>

Selasa, 21 Juli 2026

3. [HOAKS] Direktur Bank Indonesia Meninggalkan Studio dengan Penuh Amarah saat Berdebat dengan Najwa Shihab



Penjelasan:

Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul “Anda merampok keluarga-keluarga Indonesia!” — program “Rosi” berakhir dengan skandal saat siaran langsung: Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah”. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Perry Warjiyo meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa shihab pada program Rosi.

Faktanya, klaim artikel tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), nama dan desain Kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoaks di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoaks tersebut juga mencatut nama *presenter* Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, juga tayangan “Rosi” di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan artificial intelligence (AI). Hasil uji menggunakan Hive Moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif.

Hoaks

Link Counter :

- Klarifikasi Langsung dari Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani dengan Surat Nomor:28 /DKom-GSPK/Srt/B
- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/07/20/074200682/kompas.com-dicatut-untuk-sebarkan-narasi-hoaks-najwa-shihab-debat>

4. [HOAKS] Gaji PPPK Akan Dialihkan dari APBD ke APBN



Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [idntimes.com](https://www.idntimes.com), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan PPPK dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN, termasuk pengadaan PPPK, dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.

Hoaks

Link Counter :

- <https://www.idntimes.com/business/economy/benarkah-gaji-pppk-akan-dialihkan-dari-apbd-ke-apbn-cek-faktanya-00-bvq5c-sp5q50>